

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021, September 20). Terima Ganti Rugi Proyek Tol Rp 1,8 M Warga Boyolali Tidak Tertarik Beli Mobil, Tapi Pilih Ini. Retrieved from <https://jatengpos.co.id/terima-ganti-rugi-proyek-tol-rp-18-m-warga-boyolali-tidak-tertarik-beli-mobil-tapi-pilih-ini/rita/>
- Arfiyana, Rohmatika. (2021). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan di KPP Pratama Pati*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Bandiyono, A., & Fitriyani, M. (2021). Upaya Penggalan Potensi Pajak Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(1), 125-138.
- BPS Kabupaten Boyolali. (2021, October 05). [Seri 2010] PDRB Kabupaten Boyolali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2020.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penerapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Husodo, B. S., Sihabudin, S., & Harjati, E. (2017). Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 208-224.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
- Kementerian Keuangan. (2021, Januari 6). APBN KITA. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>
- Khusuma, Andhi Surya. (2020). *Tinjauan Pengawasan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- KPP Pratama Boyolali. (2019). *Buku Profil Tahunan KPP Pratama Boyolali*. Boyolali: Tim Redaksi
- Kurniati, D. (2021, November 14). Tinggal 2 Bulan, Begini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan Pajak 2021. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/tinggal-2-bulan-begini-langkah-djp-optimalkan-penerimaan-pajak-2021-34419>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

- Prof. Dr. Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ramadhan, M. R., & Liriyansah, B. (2020). TINGKAT KEPATUHAN PENGHITUNGAN PPh ATAS PENJUALAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 78-94. Simanjutak, H.T dan Mukhlis, Imam. (2012) *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Stephen P. Robin, Mary Coulter, terj. T. Hermaya, Manajemen, jilid 1, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syuhadah, M. (2020). *Tinjauan Terhadap Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama Pangkal Pinang*. Tangerang Selatan: PKN STAN.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsito, L. (2016). Potensi Korupsi Dalam Kebijakan Validasi Pajak Penjualan Atas Tanah dan Atau Bangunan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 363-369.
- Widomoko, W., & Nofryanti, N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). *Jurnal Renaissance*, 2(01), 132-146.